

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, dengan maksud untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan serta dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparansi dan akuntabel (Asmoko , 2006).

Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Namun, yang paling umum menjadi sorotan bagi yang sejauh pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari traditional budget ke performance budget (Rahayu, dkk 2007).

Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat (Sadjiarto.2000). Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk

menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika output dapat dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Dengan diterbitkannya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses penganggaran negara bereformasi ke arah penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Mardiasmo (2002:84), menyatakan bahwa system anggaran kinerja pada dasarnya merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu system penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan dimana akan terlihat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan Kinerja. Melalui PP.No 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang sekarang telah digantikan menjadi Permendagri No.13 tahun 2006, Pemerintah melakukan perubahan-perubahan besar. Perubahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perubahan Sistem Anggaran Berdasarkan PP.No 105 tahun 2005

PP 105 /2000 PERUBAHAN YANG MENDASAR	
LAMA	BARU
Sistem Anggaran Tradisional Dengan ciri : line Item & incrementalis	Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budget)
Sistem Anggaran Berimbang	Sistem Anggaran Defisit
Struktur Anggaran : 1. Pendapatan 2. Belanja	Struktur Anggaran : 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan
Belanja Dibagi : 1. Belanja Rutin 2. Belanja Pembangunan	Belanja Dikategorikan : 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3. Belanja Modal 4. Belanja Tidak Tersangka
Belanja dipisahkan per sektor, tidak ada pemisahan Belanja Publik dengan Belanja Aparatur	Belanja Dipisahkan Menjadi : 1. Belanja Aparatur 2. Belanja Publik
Pinjaman sebagai komponen Pendapatan	Pinjaman Sebagai Komponen Pembiayaan
Laporan Pertanggungjawaban : Nota Perhitungan APBD	Laporan Pertanggungjawaban : 1. Neraca 2. Laporan Arus Kas 3. Laporan Perhitungan APBD 4. Nota Perhitungan APBD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan mendasar dalam PP No. 105 tahun 2000 terutama dalam sistem penganggaran dari sistem tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budget*) yang diikuti perubahan dalam bentuk dan struktur APBD.

Selain itu, laporan Pertanggungjawaban kepala daerah yang dahulunya menggunakan instrumen tunggal yaitu nota perhitungan APBD diubah menjadi laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan daerah yang terdiri dari empat instrumen, yaitu neraca, laporan arus kas, laporan perhitungan APBD dan nota Perhitungan APBD. Perubahan juga dapat dilihat pada Anggaran Rutin Pembangunan Pemerintahan daerah.

Hijrani Putri (2009) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang” Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Easy Refikha (2009) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kota Binjai” Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintahan Kota Binjai, Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kota Binjai, Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan**”.

Dengan maksud melanjutkan penelitian sebelumnya, Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dibuat oleh saudara Hijrani Putri Lubis Peneliti merasa perlu melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Pembeluaran Anggaran Berbasis Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan, untuk membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya sama atau berbeda. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderating dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten deli serdang sedangkan penelitian selanjutnya tanpa menggunakan variabel moderating dan lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah?
2. Apakah anggaran yang terbatas berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan?
3. Seberapa besar pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan?

1.3 Batasan Masalah

Kinerja pemerintahan bisa dinilai dari aspek finansial dan non finansial. Dalam penelitian ini hanya dianalisis berdasarkan aspek non finansial yaitu Kinerja manajerial dengan menganalisis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdapat pada Pemerintahan Kota Medan pada Tahun 2011

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis untuk mengetahui Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti penelitian ini, dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Dalam bidang akademik diharapkan dapat menambah literatur yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai kinerja pemerintah.
3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Kota Medan sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

THE
Character Building
UNIVERSITY